



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANAK AGUNG GEDE EKA SUSILA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 229763

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 542.430.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/127 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 542.430.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY C1C02N16M2 A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.464.820

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.404.919

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 763.299.739

III. HUTANG Rp. 9.566.666

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 753.733.073

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.